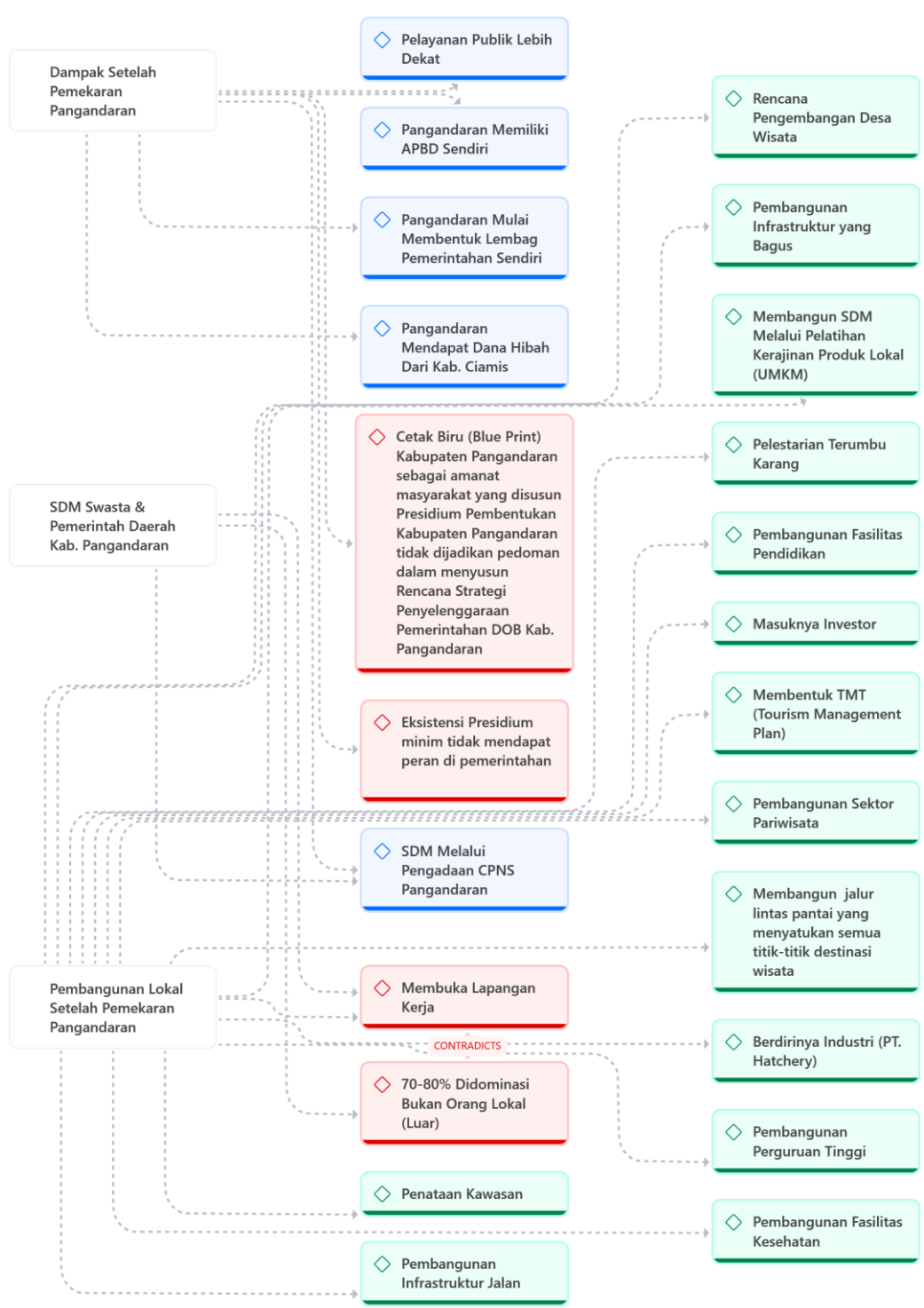


Bab VII Tata Kelola Pembangunan Lokal Daerah Otonomi Baru (DOB)

VII.1 Tipologi Pembangunan Daerah Otonomi Baru (DOB) Pangandaran

Setelah menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB), perlu dilihat dari dampak terhadap pembangunan lokal dari upaya dan perjuangan aktor-aktor yang melakukan proses panjang untuk melakukan pemekaran yang pada akhirnya bisa diwujudkan. Kabupaten Pangandaran merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Ciamis. Terbentuk pada tahun 2012 dengan dasar pembentukan Kabupaten Pangandaran tercantum didalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat.

Banyak aspek yang perlu dilihat dari hasil pemekaran Kabupaten Pangandaran, dari tujuan utama dari pemekaran itu sendiri, dan kenyataan yang terjadi setelah menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB). Aspek pemerataan pembangunan terkhususnya pembangunan infrastruktur menjadi aspek yang sangat terlihat mengalami perubahan yang bertahap setelah menjadi kabupaten baru. Mengingat bahwa pembangunan lokal menjadi faktor yang sangat penting untuk meningkatkan kemampuan daerah untuk berkembang dan lebih baik sebagai upaya menciptakan iklim pertumbuhan ekonomi yang baik, yang memiliki dampak bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Temuan lapangan setelah pemekaran Kabupaten Pangandaran terjadi, beberapa hal yang kontradiktif yaitu, dampak secara sosial yakni terjadinya migrasi yang besar yakni 70-80% didominasi bukan orang lokal, artinya bahwa masyarakat lokal Pangandaran belum bisa terakomodir untuk memiliki peluang bekerja baik di sektor pemerintahan maupun di sektor swasta di kabupaten Pangandaran. Disamping itu eksistensi Presidium setelah pemekaran memiliki peran di pemerintahan mengingat salah satu Presidium menjadi wakil bupati Pangandaran pada periode awal, namun semakin memudar dari tahun ke tahun tidak mendapat peran banyak di pemerintahan, padahal di awal proses pemekaran Presidium Pemekaran Kabupaten Pangandaran menjadi aktor perintis utama dan mengawal proses pemekaran hingga terwujud. Pembangunan lokal dan dampak setelah pemekaran Kabupaten Pangandaran dideskripsikan pada Gambar VII.1.



Gambar VII. 1 Pembangunan lokal dan dampak setelah pemekaran Kabupaten Pangandaran (Analisis atlas.ti)

Adapun tipologi pembangunan lokal daerah otonomi baru Pangandaran berdasarkan penelitian dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, ialah Pembangunan Wisata Pesisir dan Laut (*Coastal and Marine Tourism Development*). Tipologi ini memanfaatkan sumber daya pesisir dan laut, seperti pantai, terumbu karang, dan kegiatan berbasis air seperti menyelam dan snorkeling (C. M. Hall, 2001). Konsep pembangunan ini dilakukan dengan memastikan pariwisata pesisir mencakup berbagai macam kegiatan pariwisata, rekreasi, dan rekreasi yang berlangsung di zona pesisir dan perairan lepas pantai (Miller dan Auyong, 1991). Hal ini mencakup pengembangan pariwisata pesisir seperti akomodasi, restoran, industri makanan, dan rumah tinggal, serta infrastruktur yang mendukung pengembangan pesisir.

Pembangunan sektor pariwisata pesisir pantai ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ekonomi lokal (Ji dan Ding, 2024), Karena wilayah pesisir dan laut merupakan pusat kegiatan ekonomi dan rekreasi, pengembangan keterampilan pariwisata yang ramah lingkungan sangat penting untuk dijaga (Commission, 2020). Pengembangan ekonomi lokal dilihat berdasarkan beberapa aspek, antara lain kelompok sasaran, faktor lokasi, fokus dan sinergi kebijakan, keberlanjutan, manajemen proses, dan tata kelola (Soetanto dkk., 2020). Hal ini juga tidak terlepas dari prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan yang memastikan pembangunan ekonomi, sosial, dan alam secara bersamaan dan pemeliharaan sumber daya alam (Dangi dan Jamal, 2016). Selain itu keterlibatan multi aktor pemangku kepentingan untuk memastikan keberlanjutan lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan masyarakat lokal penting untuk pembangunan pariwisata pesisir dan laut yang berkelanjutan, (Franzén dkk., 2024). Adapun karakteristik Pembangunan wisata pesisir dan laut (*coastal and marine tourism development*) dijelaskan pada Tabel VII.1.

Tabel VII. 1 Karakteristik pembangunan wisata pesisir dan laut (*coastal and marine tourism development*)

Aspek	Karakteristik	Sumber
Ekologi	Mengutamakan pelestarian ekosistem laut dan pesisir, termasuk terumbu karang, mangrove, dan pantai.	(C. M. Hall, 2001; Gössling dkk., 2018)
Sosial budaya	Mengintegrasikan budaya lokal dan tradisi masyarakat pesisir	(Hughes dkk., 2015; Loch dan Riechers, 2021)
Ekonomi	Menciptakan lapangan kerja dan peluang bisnis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.	(Castanho dkk., 2020; Dodds dan Butler, 2009)
Kelembagaan	Melibatkan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal dalam tata kelola wisata.	(Bramwell dan Lane, 2000; Franzén dkk., 2024)
Perencanaan tata ruang	Tata kelola zonasi wilayah untuk mengimbangi wisata, konservasi, dan aktivitas nelayan.	(Diedrich dan García-Buades, 2009)
Infrastruktur	Menyediakan fasilitas yang ramah lingkungan, seperti dermaga kecil, toilet kompos, dan jalur hijau untuk jalan kaki.	(Kenchington, 1993; Davenport dan Davenport, 2006;)
Komunitas lokal	Memberdayakan masyarakat lokal melalui pelatihan, pendidikan dan peluang usaha lokal.	(Mograbi dan Rogerson, 2007; Wearing dan McDonald, 2002)
Daya dukung lingkungan	Mempertimbangkan kemampuan ekosistem untuk mencegah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas wisata yang berlebihan	(Gössling, 2002; Mejjad dkk., 2022)
Pengelolaan resiko	Mengantisipasi efek bencana alam seperti tsunami, erosi pantai, dan kenaikan permukaan laut.	(Brown dkk., 2001; C. M. Hall dkk., 2012)

Karakteristik tipologi pembangunan wisata pesisir dan laut (*coastal and marine tourism development*), pada tipologi pembangunan lokal kabupaten Pangandaran berbasis pariwisata mencerminkan berbagai strategi yang dapat disesuaikan dengan potensi sumber daya pesisir dan laut yang dimiliki, untuk meningkatkan iklim pertumbuhan lokal yang baik dan lebih utama adalah memastikan manfaat jangka panjang bagi komunitas lokal. Untuk itu pentingnya memperkuat kerangka kelembagaan dan hukum dalam melindungi ekosistem pesisir dan laut yang rentan terhadap aktivitas ekonomi yang membahayakan ekosistem pesisir dan laut (Barbier dkk., 2011). Maka dari itu perlunya kolaborasi antara pemerintah, komunitas lokal, dan sektor swasta untuk menciptakan kebijakan yang tidak hanya melindungi lingkungan tetapi juga mendorong praktek pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, yang berfokus pada perbaikan tata kelola kelembagaan dan memperkuat kerangka regulasi, ekosistem pesisir dan laut dapat tetap menjadi aset

lokal yang berharga bagi generasi yang akan datang. Adapun tata kelola pembangunan wisata pesisir dan laut kabupaten Pangandaran dideskripsikan pada Gambar VII.2.



Gambar VII. 2 Desain tata kelola pembangunan wisata pesisir dan laut kabupaten Pangandaran: (a) pembangunan infrastruktur jalan pesisir pantai, (b) pembangunan ruang publik pesisir pantai

Peta wisata pesisir dan laut kabupaten Pangandaran dapat dilihat di Lampiran B

VII.2 Rancangan dan Ibu Kota Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Pangandaran

Sebagai Kabupaten termuda di Provinsi Jawa Barat, salah satu sarana yang cukup mendesak keberadaannya dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan adalah tersedianya kantor pemerintahan yang representatif beserta prasarana penunjangnya. Kantor-kantor pemerintahan saat ini masih memanfaatkan eks kantor-kantor kecamatan dan sebagian lagi menggunakan rumah penduduk sebagai sarana pelayanan publik sementara yang mengakibatkan kondisi tersebut tidak ideal, sehingga mendesak diperlukannya suatu pusat perkantoran yang lebih baik dan terintegrasi. Saat ini Kabupaten Pangandaran sedang membangun Kawasan Pusat Perkantoran Kabupaten di Kecamatan Parigi yang merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur dalam melaksanakan fungsinya dengan baik dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai bagian dari kawasan pemukiman perkotaan, kawasan kota baru harus direncanakan, dilaksanakan, dan dikelola dengan baik dengan memasukkan elemen kota hijau dan kota cerdas. Ini akan membantu membangun kawasan pemukiman yang layak huni dan berkelanjutan. Luas Kecamatan Parigi adalah 11.189,51 ha, terbagi kedalam 10 Desa. Desa yang termasuk dalam kecamatan Parigi dapat dilihat pada tabel VII.1.

Tabel VII. 2 Luas Desa di Kecamatan Parigi

No	Desa	Luas (Ha)
1	Parigi	791,70
2	Karangjaladri	227,66
3	Karangbenda	672,08
4	Ciliang	728,60
5	Cibenda	868,14
6	Bojong	1.213,35
7	Selasari	3.239,09
8	Cintaratu	1.019,48
9	Cintakarya	1.100,17
10	Parakanmanggu	1.321,01
Total		11.181,25

Sumber: Hasil Analisis Peta Batas Administrasi, 2020

Arah perkembangan suatu wilayah akan sangat dipengaruhi oleh rencana pemanfaatan lahan di wilayah tersebut. Kabupaten Pangandaran saat ini sedang melakukan pembangunan kawasan pusat pemerintahan yang terdiri dari perkantoran serta fasilitas-fasilitas umum dan sosial yang mendukung fungsi dari kawasan pusat pemerintahan. Sebagai Kabupaten yang baru terbentuk tahun 2012 saat ini Kabupaten Pangandaran sedang berupaya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat termasuk pembangunan kawasan pusat pemerintahan yang menjadi sarana dan prasarana pendukung dalam memberikan pelayanan yang efektif dan efisien. Dalam merencanakan pembangunan kawasan pusat pemerintahan harus dilakukan secara komprehensif dan juga terintegrasi. Artinya perencanaan harus dilakukan dengan tidak mengesampingkan kemungkinan perkembangan yang terjadi di sekitar kawasan pusat pemerintahan, sehingga perkembangan wilayah di sekitar pusat pemerintahan akan terarah dan terpadu dengan kawasan pusat pemerintahan.

Pemerintah Kabupaten Pangandaran mulai Tahun Anggaran 2020 sedang melaksanakan Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan bertempat di Desa Cintakarya Kecamatan Parigi dengan luas kurang lebih 22 (dua puluh dua) hektar. Pelaksanaan kegiatan pembangunan ini dilaksanakan secara bertahap. Selain Pembangunan dimaksud, saat ini dalam proses perencanaan pembangunan pusat perkantoran untuk instansi vertikal di Desa Ciliang Kecamatan Parigi dengan luas kurang lebih 17 (tujuh belas) hektar. Untuk mendukung kegiatan tersebut Pemerintah Kabupaten Pangandaran juga merencanakan pembangunan jalan akses menuju pusat perkantoran. Kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Pangandaran masih satu hamparan dengan kawasan pendidikan tinggi Universitas Padjadjaran dan dikelilingi oleh kawasan pemukiman dan kawasan pertanian.

Pertumbuhan pada wilayah tersebut akan membentuk kawasan kota baru yang jika tidak ditata secara baik dikhawatirkan terjadi perkembangan wilayah yang tidak terkendali. Berdasarkan hal dimaksud maka perlu adanya konsep penataan wilayah, sebagai upaya untuk mencegah perkembangan kawasan yang tidak terarah dan tumpang tindihnya fungsi kawasan serta sebagai *guide* untuk perencanaan pembangunan pada kawasan tersebut agar terciptanya fungsi kawasan yang terpadu dan berkelanjutan. Penggunaan lahan di Kecamatan Parigi cukup bervariasi.

Penggunaan lahan terbesar yaitu penggunaan untuk kebun seluas 60.139,99 ha atau sekitar 53,3% yang dilanjutkan dengan penggunaan sawah irigasi seluas 12.970,50 ha atau sekitar 11,5%. Data ini dilihat berdasarkan tutupan lahan di Kecamatan Parigi pada tahun 2018. Penggunaan lahan di Kecamatan Parigi tercantum pada tabel VII.2.

Tabel VII. 3 Penggunaan Lahan di Kecamatan Parigi

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1	Air Laut	55,68
2	Air Tawar	968,18
3	Belukar/Semak	10.842,62
4	Empang	31,83
5	Gedung	4,84
6	Hutan	7.020,97
7	Hutan Rawa	408,91
8	Kebun	60.135,99
9	Pasir Darat	131,86
10	Pasir Pantai	11,99
11	Pemukiman	5.656,85
12	Rawa	166,58
13	Rumput	392,56
14	Sawah Irigasi	12.970,50
15	Sawah Tadah Hujan	8.338,82
16	Tanah Ladang/Tegalan	5.685,18
	Grand Total	112.823,37

Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran, diolah 2020

Rencana Kota Baru Pusat Pemerintahan Kabupaten Pangandaran adalah kota baru yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Ini terdiri dari kawasan perkantoran pemerintah daerah, kawasan perkantoran instansi vertikal yang ditugaskan, dan kawasan pemukiman di sekitar kawasan perkantoran. Kota Baru Pusat Pemerintahan Kabupaten Pangandaran, yang terletak di Kecamatan Parigi, dirancang dan dibangun dengan konsep kota mandiri. Konsep ini menggabungkan area dan aktivitas pusat pemerintahan dengan area pemukiman dan area komersial. Menciptakan kota baru dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan hidup dengan menerapkan konsep kota hijau. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan membuat area hijau di bagian dalam kota sebagai pusat aktivitas. Selain menerapkan konsep yang ramah lingkungan untuk kota baru pusat pemerintahan, juga dirancang dengan mempertimbangkan kearifan lokal untuk pengembangan dan perancangan kota baru. Salah satu contohnya adalah dengan menerapkan arsitektur khas wilayah yang menjadi identitas Kabupaten Pangandaran untuk kota baru pusat pemerintahan.

Perencanaan kawasan perkantoran sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Pangandaran setelah menjadi DOB, yang sejak awal pusat pemerintahannya berada di bukit yang menghadap kearah pantai Pangandaran, yang menawarkan pemandangan yang indah. Namun demikian akses ke kantor pemerintahan belum begitu optimal mengingat akses yang cukup jauh, kemudian luas jalan yang dilewati relative masih sempit untuk dilewati oleh banyak kendaraan. Masterplan Kawasan Perkantoran Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada Lampiran C.

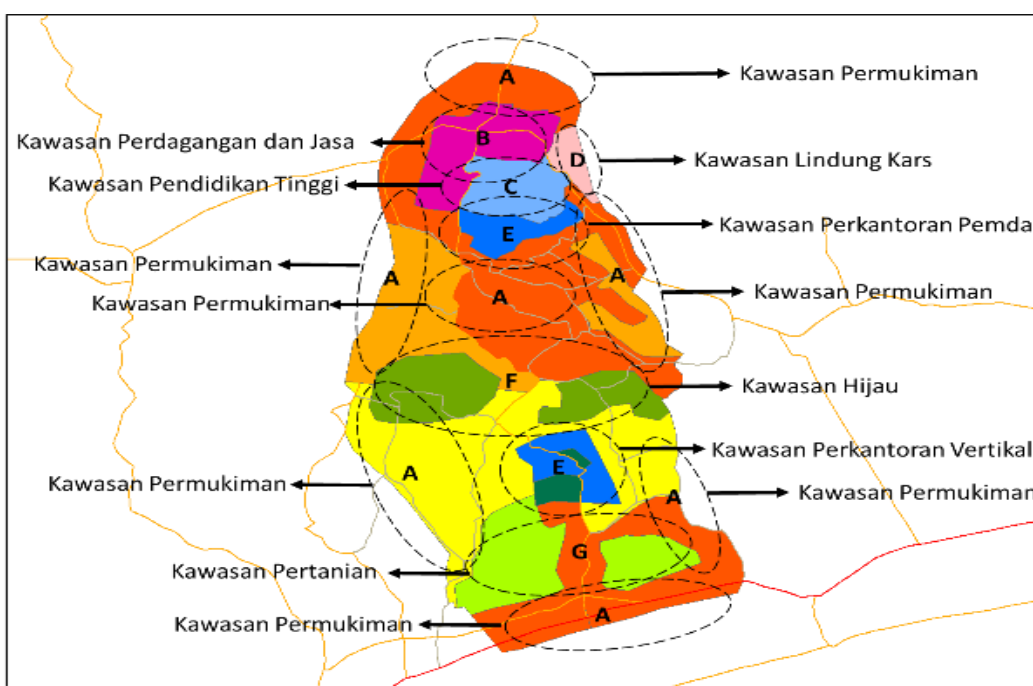
Penetapan lokasi Kota Baru Pusat Pemerintahan dilakukan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangandaran yang mengamanatkan pusat pemerintahan berada di Kecamatan Parigi. Selain itu dalam RTRW Kabupaten Pangandaran telah ditetapkan kawasan strategis kabupaten pusat pemerintahan. Berdasarkan RTRW, kawasan Kota Baru di Kecamatan Parigi direncanakan untuk dibangun sebagai kawasan pemerintahan terpadu dengan pelayanan pemerintahan tingkat kabupaten. Kabupaten Pangandaran masih belum memiliki infrastruktur pemerintahan yang memadai sebagai DOB. Untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat Kabupaten Pangandaran, perlu dibangun lokasi pemerintahan terpadu di mana seluruh bagian pemerintahan dapat bekerja sama untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Dipilih sebagai lokasi kawasan pemerintahan, Kota Baru Pusat Pemerintahan di Kecamatan Parigi berada di Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Parigi, yang merupakan ibu kota Kabupaten Pangandaran, dan berada di lokasi yang strategis untuk menjadi kawasan khusus pemerintahan. Lokasi Kota Baru Kabupaten Pangandaran dapat dilihat di Lampiran D

Lokasi Kota Baru apabila dilihat dalam konstelasi regional berada di Tenggara pulau Jawa berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah yakni Kabupaten Cilacap. Berjarak ± 220 KM dari ibu kota Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung, dan ± 359 KM dari ibu kota Indonesia di Jakarta. Kota terdekat dengan Kota Baru Pusat Pemerintahan yakni Kota Banjar dengan jarak ± 69 KM dan dari Kota Tasikmalaya ± 95 KM serta ± 117 KM dari pusat pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya. Sebagai kawasan dengan pelayanan tingkat Kabupaten, lokasi Kota Baru Pusat Pemerintahan perlu dilihat keterkaitannya dengan pelayanan tingkat kabupaten lainnya, seperti terminal, Pelabuhan, bandara, rumah sakit, dan lain sebagainya. Kecamatan Parigi apabila

dilihat secara posisi berada di tengah-tengah Kabupaten Pangandaran. Kota Baru Pusat Pemerintahan berjarak ± 14 KM ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pangandaran, berjarak ± 8 KM ke kawasan simpul transportasi yang didalamnya terdapat terminal penumpang, bandara, stasiun, serta berjarak ± 5 KM ke Pelabuhan. Sarana penunjang aktivitas yang berkaitan dengan aktivitas pada Kota Baru Pusat Pemerintahan antara lain rencana Pusat Budaya yang berjarak ± 7 KM dan rencana Sport Center ± 14 KM, termasuk Perpustakaan Daerah yang berjarak ± 10 KM.

Dalam perkembangannya, akan terdapat keterkaitan antar fungsi-fungsi kawasan, termasuk kota baru dengan kawasan lainnya. Untuk itu perlu dipetakan lokasi kota baru dengan kawasan lainnya. Bila dilihat dari lokasinya, Kabupaten Parigi adalah pusat pemerintahan Kabupaten Pangandaran. Lokasi kota baru sebagai Pusat Pemerintahan harus dipertimbangkan dengan mempertimbangkan hubungannya dengan layanan tingkat kabupaten lainnya, seperti terminal, pelabuhan, bandara, rumah sakit, dan lainnya. Orientasi kota baru pusat pemerintahan terhadap Jawa Barat dan kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada Lampiran E dan F

Pengaturan Rencana zonasi Kota Baru Pusat Pemerintahan menetapkan fungsi-fungsi kawasan Kota Baru Pusat Pemerintahan. Fungsi lahan saat ini dan rencana zonasi pada rancangan RDTR Kawasan Perkotaan Parigi digunakan untuk menentukan konsep pembagian zona pada Kota Baru Pusat Pemerintahan. Zona-zona yang berhubungan satu sama lain disebut zona yang ditetapkan. Gambar berikut menunjukkan rencana pembagian zona Kota Baru Pusat Pemerintahan. Rencana zonasi pada kota baru pusat pemerintahan dideskripsikan pada Gambar VII.3.



Gambar VII. 3 Rencana zonasi pada kota baru pusat pemerintahan (Bappeda kabupaten Pangandaran, 2023)

Rencana zonasi kawasan Pusat Pemerintahan Kota Baru dibuat dengan mempertimbangkan fungsi lahan yang ada dan rencana zonasi yang ada dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Kota Parigi. Adapun visualisasi rancangan kota baru pusat pemerintahan dijelaskan melalui beberapa infrastruktur fisik seperti Gerbang Utama (Gerbang Kangkareng), Gerbang Cintaratu, Jembatan dan Terowongan sebagai berikut :

1. Gerbang Utama (Gerbang Kangkareng). Visioning ini diproyeksikan bahwa jalur utama di Kabupaten Pangandaran, Jalan Raya Parigi, akan diperlebar hingga 10 meter. Sementara itu, akses ke kawasan pemerintahan akan diperlebar hingga 20 meter dengan jalur dua arah. Salah satu satwa khas Kabupaten Pangandaran, Burung Kangkareng (*Anthracoseros albirostris*), digambarkan di Gerbang Utama Kawasan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran. Kepakan sayap ini menggambarkan Kabupaten Pangandaran yang selalu bergerak maju, meninggalkan masa lalu untuk menuju masa depan dan era baru. Visualisasi Gerbang Kangkareng dapat dilihat pada Lampiran G, dan Lokasi gerbang kangkareng dapat dilihat pada Lampiran H.

2. Gerbang Cintaratu. Gerbang kedua kawasan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran sedang dirancang. Akses ke wilayah administrasi akan diperluas hingga 40 m sejauh 137 m ke arah selatan dan kemudian menjadi 20 m dengan jalur dua arah. Jalan Cintaratu dan Jalan Langkap layar, yang mengarah ke kota Banjar, diperkirakan akan diperlebar hingga 10 meter menurut visioning ini. Gerbang ini berbentuk seperti perahu dengan layar berbentuk permata yang menerjang ombak. Batu permata adalah batu mineral yang terbentuk dari proses geologi yang menunjukkan kekayaan geologi kabupaten Pangandaran. Kekayaan geologi ini mencakup batu mulia dan proses geologi lain, seperti Kawasan Karst dan Pantai. Berbagai bentuk Tugu Perahu Permata mewakili berbagai potensi alam Kabupaten Pangandaran. Perahu Layar, Batu Permata, Jaring Ikan, Cumi-cumi, dan Bunga Raflesia adalah beberapa darinya. Visualisasi Tugu Perahu Permata pada Gerbang Cintaratu dapat dilihat pada Lampiran I, dan Lokasi gerbang kangkareng dapat dilihat pada Lampiran J.
2. Jembatan dan Terowongan. Area perancangan jembatan dan terowongan yang menghubungkan dua area perkantoran instansi vertikal. Sirkulasi pada area ini akan dilebarkan hingga 9 meter. Selain sebagai penghubung, terowongan dan jembatan ini menjadi salah satu *landmark* dari Kota Baru Pusat Pemerintahan. Visualisasi terowongan dan jembatan dapat dilihat pada Lampiran K dan L, serta lokasi terowongan dapat dilihat pada Lampiran M.

Selain itu Pasca Pemekaran tata kelola pembangunan lokal kabupaten Pangandaran mengalami pembangunan yang bertahap, dari mulai pembangunan kantor pemerintahan, walaupun sebagian besar belum terpusat seperti pemerintah daerah lainnya, pembangunan lebih terlihat pada infrastruktur publik lainnya, terutama akses jalan dengan memperbaiki jalan yang rusak, membangun jembatan penghubung antara wilayah, yang membantu dalam mempermudah aksesibilitas dan pertumbuhan wilayah. Karena mengingat bahwa keinginan masyarakat Pangandaran untuk melakukan pemekaran waktu dulu, aksesibilitas dan infrastruktur jalan sangat dikeluhkan karena sulitnya untuk mencapai suatu tempat untuk membawa hasil

pertanian untuk di jual ke pusat kota. Kondisi Prasarana Jalan di Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada Lampiran N.

Pembangunan infrastruktur jalan sangat diperhatikan setelah pemekaran, dimana jalan yang rusak (garis berwarna merah), yang sedikit demi sedikit dilakukan perbaikan, hal tersebut dimaksudkan untuk membantu masyarakat dalam memudahkan perjalanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari, selain itu juga membantu menghubungkan antar wilayah yang lainnya di kabupaten Pangandaran. Pembangunan jalan pantai Pangandaran, merupakan bagian dari tata kelola pembangunan lokal pemerintah kabupaten Pangandaran, yang membantu untuk menghubungkan daerah pesisir pantai, sehingga mempermudah akses dalam menikmati pariwisata pantai yang ada di Pangandaran, sehingga hal tersebut membantu dalam meningkatkan ekonomi lokal, karena terhubungnya tempat wisata pesisir pantai yang satu dengan yang lainnya. Infrastruktur Jembatan dan jalan penghubung pesisir pantai Pangandaran dapat dilihat pada Lampiran O dan P.

VII.3 Kebijakan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Pangandaran

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Provinsi Jawa Barat adalah dasar hukum pembentukan Kabupaten Pangandaran. Kabupaten Ciamis berkembang menjadi Kabupaten Pangandaran baru. Kabupaten Pangandaran terletak di bagian selatan Jawa Barat. Itu beribukota di Kecamatan Parigi dan terdiri dari sepuluh kecamatan: (a) Kecamatan Parigi; (b) Kecamatan Cijulang; (c) Kecamatan Cimerak; (d) Kecamatan Cigugur; (e) Kecamatan Langkaplancar; (f) Kecamatan Mangunjaya; (g) Kecamatan Padaherang; (h) Kecamatan Kalipucang; (i) Kecamatan Pangandaran; dan (j) Kecamatan Sidamulih). Luas total Kabupaten Pangandaran adalah +/- 1.010 km². Wilayah Kabupaten Pangandaran dibatasi oleh Desa Ciulu, Desa Pasawahan, Desa Cikupa, Kecamatan Banjarsari, Desa Sidarahayu, Kecamatan Purwadadi, Desa Sidamulih, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, dan Desa Citalahab, Kecamatan Karangjaya, dan Desa Cisarua, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya. Di sebelah utara, wilayah tersebut berbatasan dengan Desa Ciulu, Desa Pasawahan, Desa Cikupa, Kecamatan Banjarsari. Di sebelah utara, terdapat beberapa desa yang berbatasan dengannya: Desa Ciulu, Desa Pasawahan, Desa Cikupa, Kecamatan

Banjarsari, Desa Sidarahayu, Kecamatan Purwadadi, Desa Sidamulih, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, dan Desa Citalahab, Kecamatan Karangjaya, dan Desa Cisarua, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan Samudera Hindia di sebelah selatan, dan dengan Desa Pasanggrahan di Kecamatan Cikatomas, Desa Neglasari, Desa Tawang, Desa Panca Wangi, Desa Mekarsari di Kecamatan Pancatengah, Desa Cimanuk di Kecamatan Cikalong, dan Desa Mulyasari di Kecamatan Salopa di Kabupaten Tasikmalaya di sebelah barat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Provinsi Jawa Barat, tujuan pembentukan Kabupaten Pangandaran adalah untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta meningkatkan kemampuan untuk memanfaatkan potensi daerah untuk menjalankan otonomi daerah.

1. Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Pangandaran ditetapkan dalam RTRWN dan dilampirkan sebagai PKW dengan kategori II/C/2, yang berarti Pangandaran menjadi PKW dengan tahapan pengembangan ke-2, dan dikategorikan sebagai pengembangan baru untuk revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional. Pangandaran dianggap sebagai salah satu daerah andalan selain menjadi pusat komersial. Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budidaya, baik di darat maupun di laut, yang pembangunannya bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi untuk wilayah tersebut dan wilayah yang berdekatan dengannya. Kawasan andalan terdiri dari kawasan andalan darat dan kawasan andalan laut. Pangandaran termasuk dalam kawasan andalan darat Priangan Timur-Pangandaran, dengan beberapa industri, perkebunan, pertanian, perikanan, dan pariwisata.

Pangandaran juga termasuk dalam salah satu KSN (Kawasan Strategis Nasional) dalam RTRWN. KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang signifikan secara nasional terhadap ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara, atau lingkungan, termasuk wilayah yang diakui sebagai warisan dunia. Kawasan Pangandaran-Kalipucang-Segara Anakan-Nusakambangan (Pacangsanak) adalah KSN yang dimaksud berdasarkan fungsi dan

daya dukung lingkungan hidup. Kawasan Pangandaran, Kalipucang, Segara Anakan, dan Nusakambangan (juga dikenal sebagai Kawasan Strategis Nasional) diberi kategori I/B/1. Kategori ini menunjukkan bahwa Kawasan Pancangsanak termasuk dalam tahapan pengembangan I, yang mencakup rehabilitasi dan pengembangan Kawasan Strategis Nasional Dengan Sudut Kepentingan Lingkungan Hidup dengan fokus pada rehabilitasi atau revitalisasi.

2. Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat

Pangandaran ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dalam sistem perkotaan RTRW Provinsi Jawa Barat. Selain itu, di beberapa titik di dalam wilayah Kabupaten Pangandaran juga ditetapkan sebagai PKL (Pusat Kegiatan Lokal). Untuk memaksimalkan distribusi ke seluruh wilayah, PKL tersebut ditetapkan sebagai pusat kegiatan untuk melayani beberapa kecamatan yang paling dekat dengannya. PKL Kecamatan Parigi, yang saat ini berfungsi sebagai ibu kota Kabupaten Pangandaran, adalah wilayah di Kabupaten Pangandaran yang ditetapkan sebagai PKL perkotaan. Selain itu, RTRW Provinsi Jawa Barat menetapkan Kawasan Strategis Provinsi (KSP). KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan/atau pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi secara regional. KSP Pangandaran dan sekitarnya adalah salah satu KSP yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi yang terkait dengan Kabupaten Pangandaran. KSP ini termasuk dalam KSP dengan sudut penanganan ekonomi dan ditetapkan dengan kriteria sebagai Kawasan yang diprioritaskan untuk pengembangannya untuk mengurangi ketimpangan ekonomi Jawa Barat.

3. Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran tercantum didalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 direncanakan sistem perkotaan dan pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Pangandaran, meliputi:

(1) Sistem perkotaan meliputi:

- a. PKW Pangandaran sebagai pusat koleksi dan distribusi skala regional;
- b. PKL Parigi sebagai pusat pelayanan skala kabupaten;
- c. PPK sebagai pusat pelayanan kawasan meliputi: Kecamatan Padaherang; Kecamatan Mangunjaya; Kecamatan Kalipucang; Kecamatan Sidamulih; Kecamatan Cigugur; Kecamatan Langkaplancar; Kecamatan Cijulang; dan Kecamatan Cimerak;

(2) Sistem perdesaan sebagaimana berupa PPL meliputi:

- a. Desa Pangkalan, Desa Jadikarya, Desa Bojong berada di Kecamatan Langkaplancar;
- b. Desa Panyutran dan Desa Maruyungsari berada di Kecamatan Padaherang;
- c. Desa Pagerbumi berada di Kecamatan Cigugur;
- d. Desa Mekarsari dan Desa Kertamukti berada Di Kecamatan Cimerak;
- e. Desa Ciakar berada di Kecamatan Cijulang;
- f. Desa Parakanmanggu berada di Kecamatan Parigi;
- g. Desa Pagergunung berada di Kecamatan Pangandaran; dan
- h. Desa Kalijati berada di Kecamatan Sidamulih;

(3) Wilayah Pengembangan yang meliputi:

- a. Wilayah Pengembangan (WP) I diarahkan dengan fungsi utama kawasan lumbung pada yang meliputi: Kecamatan Padaherang; dan Kecamatan Mangunjaya.
- b. Wilayah Pengembangan (WP) II diarahkan dengan fungsi utama kawasan pariwisata skala nasional dan internasional yang meliputi: Kecamatan Kalipucang; Kecamatan Pangandaran; dan Kecamatan Sidamulih.
- c. Wilayah Pengembangan (WP) III diarahkan dengan fungsi utama pusat pemerintahan skala kabupaten yaitu Kecamatan Parigi;
- d. Wilayah Pengembangan (WP) IV diarahkan dengan fungsi utama agropolitan yang meliputi: Kecamatan Langkaplancar; dan Kecamatan Cigugur.
- e. Wilayah Pengembangan (WP) V diarahkan dengan fungsi utama kawasan agroindustri dan kawasan pengembangan pariwisata baru yang meliputi: Kecamatan Cijulang; dan Kecamatan Cimerak.